

### **BAB III**

#### **ARAB SPRING DAN DEMOKRATISASI DI ARAB SAUDI**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana Arab Spring itu secara umum. Dan bagaimana sikap pemerintahan Saudi terhadap proses demokratisasi yang terjadi semenjak akhir 2010 silam. Serta akan dijelaskan mengenai peran dan respon Amerika terhadap Arab Spring dan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

##### **A. Arab Spring Secara Umum**

Awal 2011 silam terjadi pergolakan politik yang sangat mengguncang dunia terlebih bagi kawasan Arab sendiri. Arab spring<sup>43</sup> merupakan musim dimana terjadi revolusi politik menjamur secara subur di negara-negara kawasan Timur Tengah. Tumbangny pemerintah yang otoriter ataupun totaliter menandai lahirnya suatu sistem baru bagi sebagian negara-negara Arab. Kebosanan dan kemuakan terhadap pemerintahan otoriterlah yang membentuk suatu tekad bagi masyarakat Timur Tengah untuk membentuk system pemerintahan baru.

Arab Spring pertama kali menumbangkan kepemimpinan Ben Ali yang kemudian terpaksa lari ke Arab Saudi pada tanggal 14 Januari 2011<sup>44</sup> untuk mendapatkan suaka politik. Bermula ketika seorang pedagang sayur bernama Mohammed Bouazizi<sup>18</sup> Desember 2010.<sup>45</sup> Pada jum'at 17 Desember 2010,

---

<sup>43</sup> "Arab Spring, jika diartikan secara literal, bermakna pemberontakan Arab. Namun, secara istilah ada pendapat yang mengatakan bahwa Arab Spring adalah istilah kebangkitan untuk kebangkitan dunia Arab atau pemberontakan yang dimulai di Tunisia pada musim semi, Desember 2010." M.

Mohamed Bouazizi membakar dirinya di depan gedung parlemen setempat.<sup>46</sup> Hal ini bukan tidak beralasan, Bouazizi melakukannya sebagai wujud kekecewaannya terhadap pemerintahan Zine al-Abidine Ben Ali yang bertindak sewenang-wenang serta merajalelanya kemiskinan dan korupsi<sup>47</sup>.

Kejadian ini membuka mata negara-negara kawasan, sehingga menginspirasi untuk membentuk suatu tatanan negara yang lebih peduli terhadap rakyat. Pergolakan politik di Tunisia ini memberikan efek domino ke negara-negara Afrika Utara lainnya. Setelah rezim Ben Ali ditumbangkan, euporia revolusi juga menular ke Mesir. Mesir yang saat itu dipimpin oleh Hosni Mubarak harus mengalami hal serupa seperti Tunisia. Rakyat menginginkan turunnya Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun.<sup>48</sup>

Pergolakan antara kubu pemerintah dan pihak oposisi berlangsung sangat sengit. Hingga Jum'at 11 Februari 2011, Hosni Mubarak mengumumkan kemunduran dirinya sebagai presiden Mesir, ia menyerahkan kekuasaannya kepada angkatan bersenjata.<sup>49</sup>

Kejadian serupa juga melanda Libya yang saat itu dipimpin oleh Moammar Khadafy. Aksi unjuk rasa terjadi di Libya pada Maret 2011.<sup>50</sup> Yang hingga akhirnya menewaskan pemimpin yang diktator *thaghut* yang kejam dan

---

<sup>46</sup> Bang Nasr. *Pahlawan revolusi Tunisia Mohamed Bouazizi* dikutip pada 16 November 2013, dari <http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/01/15/pahlawan-revolusi-tunisia-mohamed-bouazizi-334963.html>

<sup>47</sup> Ibid hlm 30

<sup>48</sup> Trias Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013), hlm. 439.

<sup>49</sup> Siwi Tri Puji B. *Pengunduran diri Mubarak diumumkan Omar Suleiman* dikutip pada 16 November 2013, dari

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/02/11/163839-pengunduran-diri-mubarak-diumumkan-omar-suleiman>

<sup>50</sup> Ibid. hlm. 107.

bengis secara mengenaskan di tempat kelahirannya di Sirte, Kamis, 20 Oktober 2011.<sup>51</sup>

Perjalanan dalam terciptanya demokrasi di negara-negara kawasan Timur Tengah ini tidak terlepas dari peran penting Amerika. Ideologilah yang mengantarkan keterlibatan Amerika Serikat ke Timur Tengah. Ambisi Amerika Serikat untuk menyamartakan sistem negara di seluruh dunia sampai juga dikawasan Timur Tengah. Terlebih Amerika sangat konsen dengan isu demokrasi serta jaminan hak azazi manusia bagi setiap individu. Disinyalir Amerika terlibat dalam setiap pergantian atau tumbangnya sistem lama di negara-negara Arab.

AS sangat mendukung gerakan-gerakan rakyat Timur Tengah yang menghendaki perubahan sistem politik dari otoriter atau totalitarian ke sistem yang demokratis. Keharusan keterlibatasn AS dalam masalah-masalah dunia itu sampai kini (abad ke 21) terus disadari oleh para pemimpin AS sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dalam pidatonya di lembaga "*The Asia Society*" di New York tgl 13 Februari 2009 yang mengatakan:

"Masyarakat dunia tidak akan dapat memecahkan persoalan dunia tanpa keterlibatan AS". Kerena itu kita menyaksikan, setiap permasalahan dunia baik dalam lingkup regional maupun global, AS selalu terlibat baik sebagai bagian dari permasalahan itu maupun dalam mencari penyelesaiannya secara langsung ataupun tidak langsung.

Seperti yang diberitakan oleh [voa-islam.com](http://voa-islam.com)<sup>52</sup> bahwa Amerika Serikat mendanai oposisi untuk menggulingkan Mursi. Dari dokumen yang diperoleh oleh

---

<sup>51</sup> Ibid. hlm. 115.

<sup>52</sup> *Amerika Serikat mendanai oposisi untuk menggulingkan Mursi*, dikutip pada tanggal 16 November 2013, dari <http://m.voa-islam.com/news/analysis/2013/07/13/25830/amerika-serikat-mendanai-oposisi-untuk-menggulingkan-mursi/>

Program Pelaporan Investigasi di Berkeley menunjukkan Amerika Serikat menyalurkan dana melalui program Departemen Luar Negeri untuk mempromosikan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Program ini mendapat dukungan penuh semangat dari aktivis dan politisi yang menggalang aksi kerusuhan di Mesir.

Peran penting Amerika disini bisa berupa dukungan dana yang diberikan kepada lembaga permasyarakatan tertentu atau organisasi tertentu. Melalui NED (*National Endowment for Democracies*)<sup>53</sup> Amerika menyalurkan banyak dana dalam menyokong berdirinya demokrasi di Timur Tengah.

Ratusan juta dolar pembayar pajak yang disalurkan melalui Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja (DRL), *The Middle East Partnership Initiative* (MEPI), USAID, organisasi semi-pemerintah *National Endowment for Democracy* (NED), dan organisasi-organisasi yang berbasis di Washington.<sup>54</sup>

Dari investigasi yang dilakukan oleh pemerintahan federal Amerika Serikat terhadap beberapa dokumen, diketahui bahwa pemerintahan Amerika Serikat banyak sekali mengeluarkan dana pembangunan demokrasi. pasca serangan terorisme pada 11 September 2001 lalu, presiden George Walker Bush pada tahun 2002 mendirikan MEPI dalam upaya mempengaruhi politik di Timur Tengah. Setidaknya sebanyak \$ 900 juta dollar telah disalurkan dalam mendirikan demokrasi di Timur Tengah. Stephen McInerney, direktur eksekutif POMED

---

<sup>53</sup> NED adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Amerika dalam membantu berdirinya demokrasi di suatu Negara. Program bantuan yang diberikan oleh pemerintah Washington dalam membantu berdirinya demokrasi di Timur Tengah dilakukan dengan disalurkan secara terstruktur

mengungkapkan bahwa Washington menghabiskan sekitar \$ 65 juta dolar pada tahun 2011 dan \$ 25 juta dolar pada tahun 2012. 2011 lalu, NED melalui departemen Luar Negeri di percaya oleh kongres untuk mengelola anggaran tahunan demokrasi sebesar \$ 118 juta. Temuan lain dari investigasi terhadap dokumen-dokumen pemerintahan Washington, bahwa terdapat beberapa tokoh penting yang mendapatkan aliran dana dari pemerintahan Washington.<sup>55</sup>

Salah satunya adalah perwira polisi Mesir, Kolonel Omar Afifi Soliman. *US Internal Revenue Service* mengungkapkan bahwa NED membayar puluhan ribu dolar untuk Soliman melalui organisasi yang ia ciptakan yang disebut Hukuk Al-Nas (Hak Rakyat), yang berbasis di Falls Church, Virginia. Soliman mendapat beasiswa HAM 2008 di NED dan pindah ke Amerika Serikat. Soliman menerima hibah kedua \$ 50.000 dolar NED kembali memberikan hibah pada tahun 2009 untuk Hukuk Al-Nas. Pada tahun 2010, ia menerima \$ 60.000 dan \$ 10.000 pada tahun 2011.<sup>56</sup>

Transisi demokrasi di Timur Tengah acapkali disertai dengan aksi kekerasan politik yang banyak memakan korban jiwa. Aksi kekerasan politik ini mengundang banyak kecaman dan tekanan dari dunia internasional. Berbagai cara dilakukan oleh pihak terkait seperti PBB dalam menyikapi persoalan ini. Dalam kasus Libya, PBB melalui dewan keamanannya mengeluarkan resolusi dan menetapkan zona larangan terbang dan perlindungan terhadap rakyat sipil yang terjebak dalam zona peperangan. Dewan Keamanan (DK) PBB akhirnya memberlakukan resolusi zona larangan terbang di Libya pada Kamis, 17 Maret

2011, setelah melalui proses pemungutan suara. Langkah ini disambut baik oleh kelompok oposisi anti pemimpin Muammar Khadafi di Libya.<sup>57</sup>

Pergolakan politik yang terjadi di Timur Tengah tercatat banyak sekali memakan korban jiwa. Dalam kasus Suriah PBB memperkirakan jumlah korban jiwa telah mencapai 2900 orang, sementara aktivis HAM memperkirakan sekurangnya 3600 orang telah tewas.<sup>58</sup>

## **B. Pengaruh Arab Spring Terhadap Demokratisasi di Arab Saudi**

Perjalanan Arab Spring juga berkejolak di wilayah Arab Saudi. Banyak kalangan masyarakat Saudi melakukan protes kejalan, demonstrasi untuk mengaspirasikan kekecewaannya terhadap pemerintahan keluarga Saud. Ratusan masyarakat berunjuk rasa guna menuntut perubahan didalam negerinya. Tidak hanya itu perempuan-perempuan juga turut melancarkan aksi mengemudi sebagai bentuk ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah yang melarang perempuan untuk mengemudi. Para intelektual dan pegiat hak asasi manusia gencar menyuarakan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang diktator ini.

Tren pergolakan politik beberapa tahun terakhir telah menjadi momok bagi Arab Saudi. Abdullah tentu saja cemas mimpi buruk itu bakal menjadi kenyataan. Rezim Bani Saud telah menguasai negara Baitullah ini sejak 1932.<sup>59</sup> Kecemasan ini sangat beralasan. Bagaimana tidak, negara-negara tetangganya

---

<sup>57</sup> Denny Armandhanu. *Zona larangan terbang diberlakukan di Libya*, di kutip pada tanggal 16 November 2013, dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/210236-zona-larangan-terbang-diberlakukan-di-libya>

<sup>58</sup> Adirini Pujayanti. *Pasca Demokratisasi Timur Tengah*. dikutip pada tanggal 17 November 2013, dari [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-III-19-I-P3DI-Okttober-2011-16.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-III-19-I-P3DI-Okttober-2011-16.pdf)

<sup>59</sup> Faisal Assega, *Beli rasa aman dengan uang kediktatoran Arab Saudi*. Di kutip pada tanggal 17 November 2013, dari <http://koran.merdeka.com/berita/beli-rasa-aman-dengan-uang-kediktatoran>

yang dulu dipimpin oleh pemimpin yang diktator, anti demokrasi hancur secara dramatis ditangan rakyatnya sendiri.

Tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa Arab Spring ini telah menumbangkan rezim Zainal Abidin bin Ali di Tunisia telah berusia lebih dari dua dasawarsa, Husni Mubarak di Mesir (32 tahun), dan Muammar al-Qaddafi di Libya (42 tahun).<sup>60</sup> Bahkan usaha para demonstran di beberapa negara seperti Libya dan Mesir di bantu oleh keberadaan Amerika Serikat di dalamnya.

Meskipun mulanya pemimpin-pemimpin tersebut bekerjasama, namun dalam momen Arab Spring ini AS memutar haluannya untuk lebih memilih rakyat untuk mendirikan demokrasi dibandingkan bekerjasama dengan pemerintah yang berkuasa untuk menekan terjadinya pergolakan politik dari masyarakat. Perlakuan Amerika ini sangat bertolak belakang, terlihat adanya ambiguitas Amerika dalam menyikapi desakan rakyat Arab Saudi untuk menciptakan hal yang sama seperti di Libya dan Mesir.

Tidak adanya dukungan ril yang di berikan oleh Amerika kepada rakyat Saudi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pendanaan dan dukungan militer yang diberikan Amerika kepada pihak oposisi di Libya dan Mesir. Tampaknya Amerika enggan atau bahkan diminta untuk tidak memberikan dukungan bagi rakyat Arab Saudi dalam mencapai negara dengan system demokrasi.

Selain tidak adanya dukungan Amerika terhadap oposisi di Arab Saudi, fungsi media sosial juga tidak dapat digunakan secara efektif oleh oposisi atau rakyat Arab Saudi. Karena di beberapa negara seperti Mesir, peran media sosial

juga sangat menentukan terwujudnya demokrasi. Di Arab Saudi penggunaan media sosial dilarang, dengan alasan bahwa media sosial dapat menyebarkan pesan-pesan yang tidak benar. Seperti yang dituding oleh Sheikh Abdul-Latif al-Sheikh, seorang kepala polisi agama di Arab Saudi menyatakan jika warga negerinya akan merugi jika gunakan *microblogging* ini. Pada bulan Maret 2011 lalu misalnya, di depan para ulama Arab Saudi, Sheikh Abdul-Latif al-Sheikh menuding jika Twitter sebagai media penyebar pesan-pesan tidak benar. Ia menyoroti Twitter sebagai alat hasut.<sup>61</sup>

Oleh sebab itu dalam menciptakan negara dengan system demokrasi di Arab Saudi menemui beberpa hambatan, hingga saat ini isu Arab spring mulai terbenam dengan munculnya isu-isu internasional lainnya. Sepertinya terdapat ketakutan yang sangat besar dikalangan al-Saud *brotherhood* dan petinggi Arab Saudi lainnya. Kekhawatiran petinggi Saudi ini sangat beralasan, karena media sosial dapat mengkoordinir gerakan dan menggalang dukungan yang sangat besar terlebih bagi kalangan pemuda yang hampir secara keseluruhan memiliki akun media social sendiri.

---

<sup>61</sup> *Pejabat Arab Saudi: Pengguna Twitter Celaka Dunia Akhirat*, dikutip pada tanggal 19 November 2012 dari <http://idemi.com/186044/pejabat-arab-saudi-pengguna-twitter-celaka>



### C. Kebijakan Arab Saudi Terhadap Demokrasi Dalam Arab Spring

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Dalam kamus hubungan internasional demokrasi dapat di definisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintah dimana seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (pemerintahan rakyat).<sup>62</sup>

Robert Dahl (1973)<sup>63</sup> mengemukakan bahwa ciri khas demokratisasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warga di negaranya. Adapun beberapa syarat yang harus di penuhi antara lain:

- a. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi
- b. Kebebasan mengemukakan pendapat
- c. Hak memilih dalam pemilihan umum
- d. Hak menduduki jabatan publik
- e. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara
- f. Tersedianya sumber informasi alternative
- g. Pemilu yang bebas dan jujur, dan
- h. Adanya lembaga-lembaga penjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara pemilihan umum dan cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Banyak sekali fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Arab Saudi merupakan negara non-demokrasi. *Pertama* yaitu, pengekangan hak-hak individu. Terutama bagi perempuan. Perempuan Saudi dilarang mengendarai, karena

<sup>62</sup> Sarjono Elzabar, *Kamus Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Utama, 2012). Hlm. 32.

<sup>63</sup> Robert Dahl, *Democracy and Its Critics*, (New Haven: Yale University Press, 1973).

menurut ulama setempat mengemudi bagi perempuan adalah melanggar aturan yang berlaku. Namun menurut Kepala polisi Arab Saudi Abdulatif Al al-sheikh, larangan mengemudi ini tidak termasuk dalam aturan syariah islam mana pun. "Syariah Islam tidak menyebutkan secara tertulis larangan perempuan mengemudi."<sup>64</sup>

*Kedua* yaitu, pelanggaran hak asasi manusia. Tidak hanya itu, pemerintah Arab Saudi tidak akan segan-segan menghukum para penyeru hak asasi. Menurut catatan Amnesty internasional Arab Saudi telah mengeksekusi mati 69 orang selama tahun ini. Pemerksaan, pembunuhan, murtad, perampokan bersenjata dan perdagangan narkoba, semua bisa dijatuhi hukuman mati di bawah hukum syariat yang ketat yang diberlakukan oleh negara kaya minyak tersebut. Amnesty menganggap Arab Saudi telah gagal memenuhi janjinya terhadap PBB semenjak 2009 silam.<sup>65</sup>

Arab Saudi mulai menggeliat oleh aksi pro-demokrasi. Lebih dari 100 orang terdiri dari akademisi, aktivis dan pengusaha menyerukan reformasi besar di Arab Saudi, termasuk pembentukan sebuah monarki konstitusional. Pernyataan tersebut diterbitkan pada Minggu bulan September 2012 di internet, seperti dikutip dari VOA juga menyerukan agar anggota majelis penasehat kerajaan, yang dikenal sebagai Dewan Syura, untuk dipilih daripada ditunjuk. Selain itu,

---

<sup>64</sup>Pandasurya Wijaya. *Kepala Polisi Saudi Larang Perempuan Mengemudi Bukan Syari'ah*, dikutip pada tanggal 29 Desember 2013, dari <http://www.merdeka.com/dunia/kepala-polisi-saudi-larangan-perempuan-mengemudi-bukan-syariah.html>

<sup>65</sup> *Pelanggaran HAM di Arab Saudi Meningkat*, di kutip pada tanggal 29 Desember 2013, dari <http://www.dpd.prb.go.id/dokumen/berita/17171996>

pernyataan tersebut termasuk tuntutan reformasi ekonomi dan sosial, di negara di mana kebebasan perempuan sangat dibatasi.<sup>66</sup>

Surat kabar Lebanon As-Safir, dalam sebuah artikelnya “Arab Saudi Takut terhadap Revolusi Bahrain” menjelaskan bahwa Arab Saudi memiliki ketakutan atas merembetnya angin revolusi ke negaranya.<sup>67</sup> Pemerintahan Arab Saudi semakin waspada terhadap gerak gerik serta tindakan yang dilakukan oleh rakyatnya. Tidak hanya itu pemerintah Saudi juga menjadi lebih protektif terhadap rakyatnya. Pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang refresif untuk menjaga integritas keluarga Saud dan menjaga keamanan negaranya.

Bila dirujuk pada teori demokrasi menurut Robert Dahl, dapat disimpulkan kebijakan pemerintah Arab Saudi sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi

Paham Salafy (Wahabi) yang berasal dari Saudi Arabia tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya kerajaan tersebut. Ibn Saud yang mendirikan Kerajaan Saudi Arabia menggandeng paham Wahabi sebagai aliran agama Islam resmi negara. Ibn Saud menggunakan doktrin Salafy untuk menjaga kekuasaannya. Selain itu di sakralitas agama dapat dijadikan sebagai mekanisme control. Secara konstan agama telah digunakan untuk melegitimasi dan melanggengkan tatanan yang berlaku.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Algooth Putranto. *Demokrasi Arab Saudi Menghangat*, dikutip pada 17 Desember 2013, dari <http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/demokrasi-arab-saudi-menghangat>

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 224.

<sup>68</sup> H. Lina Baskat. *Demokrasi Arab Saudi*. Bandung: Nuancemedia 2013. Hlm 176

Hal ini sangat terlihat dari apa-apa yang diajarkan yaitu menjauhkan rakyat dari organisasi atau melarang orang berorganisasi. Masyarakat yang tidak tergorganisir akan sangat mudah dikendalikan. Organisasi masyarakat merupakan ancaman bagi pemerintah. Gerakan-gerakan atau organisasi Islam yang di luar Wahabi Salafi atau yang tidak segaris dengan manhaj (aturan standar ideologi) Wahabi akan mendapat label syirik, kufur atau bid'ah dari pemerintah Saudi.<sup>69</sup>

Berikut merupakan salah satu kutipan dari website Darussalaf yang merupakan celaan terhadap organisasi Wahdah Islamiyah.

*“...Selain itu, hampir seluruh aktivitas dakwah kader-kader WI, dimana pun mereka berada, senantiasa menonjolkan label WI, sehingga orang-orang awam di kalangan mereka bisa langsung memiliki persepsi memang beda antara WI dan Salafy. WI mengajak kepada organisasi, sedang Salafy mengajak untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah ala pemahaman sahabat....”<sup>70</sup>*

b. Tidak adanya kebebasan mengemukakan pendapat

Rakyat Saudi perlahan semakin gencar menentang kebijakan pemerintahan yang selama ini sangat protektif dan merugikan rakyat. Namun aksi demonstrasi ini disikapi oleh pemerintah Arab Saudi dengan tindakan yang sangat tegas. Para ulama yang berafiliasi ke kerajaan mengeluarkan larangan atau haram untuk berdemonstrasi.

Juru bicara kementerian dalam negeri menegaskan bahwa “Peraturan yang berlaku di Kerajaan tegas melarang segala macam demonstrasi, masirah (*long march*), pemogokan, dan menyerukannya. Sebab semua itu bertentangan dengan

<sup>69</sup> Ahmad Fatih. *Nama Ulama Wahabi Salafi*. dikutip pada tanggal 07 Januari 2014, dari <http://www.alkhoirot.net/2011/12/nama-ulama-wahabi-salafi.html>

<sup>70</sup> *Negara Arab Saudi*, di kutip pada tanggal 9 Januari 2014, dari <http://wihdahtravel.com/negara->

prinsip syariah Islam, nilai dan norma masyarakat Saudi.”<sup>71</sup> Bagi warga atau kelompok yang melanggar aturan ini akan dikenakan hukuman penjara tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. *Human Rights Watch* mengatakan lebih dari 160 demonstran telah ditahan sejak Februari 2011 lalu, sebagai bagian dari tindakan keras pemerintah Saudi terhadap para demonstran anti-pemerintah.<sup>72</sup>

Seperti yang dilakukan oleh dua pegiat hak asasi Arab Saudi, Muhammad Fahad al-Qahtani dan Abdullah al-Hamid, mulai menjalani sidang sejak Sabtu pekan lalu. Keduanya dijerat berbagai dakwaan, antara lain mendirikan organisasi pembela hak asasi tanpa izin dan tidak patuh terhadap pemimpin negara.<sup>73</sup> Mereka diancam penjara lima tahun. Mereka diketahui mengusung Asosiasi Hak-hak Sipil dan Politik Arab Saudi, *Saudi Civil and Political Rights Association* (ACPRA).

c. Tidak adanya persaingan untuk memperoleh dukungan dan suara

Tidak adanya persaingan untuk memperoleh dukungan dan suara dari masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem yang dianut oleh Arab Saudi adalah monarki absolute. Dimana kekuasaan penuh berada ditangan Raja dan penerusnya. Yang akan mengemban jabatan sebagai raja adalah putra-putra raja atau pangeran yang memenuhi syarat sebagai raja.

Namun demikian, meskipun tidak adanya persaingan dalam memperoleh suara ataupun dukungan dari masyarakatnya, terjadi persaingan diantara pangeran-pangeran tersebut. Seperti kasus yang sedang berlangsung di Arab Saudi

---

<sup>71</sup> Arab Saudi Larang Demonstrasi Sebab Bertentangan Dengan Islam. Dikutip pada tanggal 29 Desember 2013. dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/07/arab-saudi-larang-demonstrasi-sebab-bertentangan-dengan-islam/>

<sup>72</sup> Ibid, hlm 1.

<sup>73</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, *Saudi Adili Dua Pegiat Hak Asasi*, dikutip pada tanggal 29

saat ini. Terdapat persaingan sengit diantara putra dan cucu pewaris kerajaan untuk mendapatkan posisi utama di Arab Saudi. Mereka adalah Nayef bin Abdul Aziz, Salman bin Abdul Aziz, Sultan bin Abdul Aziz, Khalid bin Sultan, Mutaib bin Abdullah.<sup>74</sup> Hingga saat ini, hal ini masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan.

d. Pembatasan pemanfaatan sumber informasi alternatif

Pembatasan pemanfaatan sumber informasi alternatif ini dibagi dalam beberapa hal. Hal ini meliputi antara lain:

1. Pelarangan penggunaan Situs Jejaring Sosial

Kepala polisi syariah Arab Saudi Sheikh Abdullatif al Sheikh, mengutuk penggunaan media sosial Twitter.<sup>75</sup> Dikutip dari laman BBC, beliau mengatakan bahwa para pengguna jejaring sosial terutama Twitter merupakan orang-orang yang merugi baik dunia maupun akhirat. "Twitter adalah panggung berbicara bagi mereka yang tak punya tempat (tak dipandang),"<sup>76</sup>

Tidak hanya itu, pernyataan kontroversi mengenai penggunaan Twitter ini sebelumnya sudah pernah di kritik oleh Al-Sheikh. Akhir bulan Maret 2012, beliau menyatakan bahwa Twitter merupakan media untuk menyebarkan pesan-pesan yang tidak benar.<sup>77</sup>

Untuk mengantisipasi hal ini pemerintah berencana akan menghubungkan akun twitter mereka dengan nomor kartu identitas penduduk. Dengan hal ini

---

<sup>74</sup> *Ada Kudeta Terselubung di Istana Raja Arab Saudi*. Dikutip pada tanggal 29 Desember 2013. Dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/11/30/ada-kudeta-terselubung-di-istana-raja-arab-saudi/>

<sup>75</sup> Ichsan Emerald Alamsyah. *Polisi Saudi: Pengguna Twitter Merugi Dunia dan Akhirat*. dikutip pada tanggal 1 Januari 2014, dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-1/13/05/14/>

pemerintah Saudi beranggapan bahwa tidak akan ada lagi pengguna twitter yang tidak memiliki identitas.<sup>78</sup> Jika ada yang melanggar maka akan dikenakan hukuman yang berat, yaitu hukuman mati.

## 2. Pembungkaman Media Massa

Dalam undang-undang Saudi pasal 39 di jelaskan bahwa, media masa, fasilitas publikasi dan sarana ekspresi lainnya berfungsi dengan sopan dan santun dan diatur lewat Hukum Negara. Mereka memainkan peran sebagai pendidik massa dan menjaga keutuhan bangsa. Semua yang bisa menimbulkan kekacauan dan perpecahan, atau membahayakan keamanan Negara dan image masyarakat, atau menyerang martabat manusia, haknya akan dicabut.<sup>79</sup>

Media-media Saudi memang sejak lama telah diprotek oleh pihak pemerintah Saudi. Terlebih menyusul aksi gelombang demokrasi yang dikhawatirkan juga akan menumbangkan kerajaan Saud. Baru-baru ini Raja Abdullah menginstruksikan amandemen undang-undang media dan menentukan hukuman berat terhadap media yang membangkang.<sup>80</sup> Media di Arab Saudi dilarang untuk mengkritik kebijakan kerajaan dan mengekspos mengenai gejolak revolusi yang ada. Pemerintah Saudi mengancam pada kantor-kantor berita yang dianggap terlibat atau ikut campur dalam memperkeruh suasana dalam negeri dengan denda berat dan penutupan.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid hlm 1.

<sup>79</sup> Ibid hlm 1.

<sup>80</sup> IRIB. *Takut Didemo, Arab Saudi Batasi Gerak Media Massa*. dikutip pada tanggal 1 Januari 2014, dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/05/01/lkich7-takut-didemo-arab-saudi-batasi-gerak-media-massa>

<sup>81</sup> *Saudi Arabia Batasi Media Masa*. dikutip pada tanggal 1 Januari 2014, dari <http://islamtimes.org/vdcevo8p.jh8voiarbj.txt>

Dikutip dari Rasa News edisi 7 Februari 2012 pemerintah Saudi juga mengeluarkan kebijakan larangan bagi media massa untuk mempublikasikan berita kemiskinan dan keterbelakangan dalam negeri.<sup>82</sup> Karena isu ini dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang protes yang besar dari masyarakat.

Tidak adanya Pemilu yang bebas dan jujur

Di Arab Saudi tidak terdapat pemilihan umum seperti yang dilakukan di negara-negara demokrasi. Jangankan pemilihan umum, pemilihan dewan kota saja tidak pernah berlangsung di Saudi, seperti dilansir stasiun televisi *CBS News* pertengahan Juni 2011.<sup>83</sup> Dalam menentukan presiden dalam hal ini adalah Raja, maka di Arab Saudi diberlakukan system monarki, dimana anak atau cucu yang berkuasalah yang akan mengemban jabatan sebagai presiden berikutnya.

Dalam pasal 5 bulir (b) dijelaskan bahwa: Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi syarat dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Arab Saudi Larang Publikasi Berita Kemiskinan di Dalam Negeri*. di kutip pada tanggal 1 Januari 2014, dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/02/08/arab-saudi-larang-publikasi-berita-kemiskinan-di-dalam-negeri/>

<sup>83</sup> Faisal Assegaf, *Beli Rasa Aman Dengan Uang: Kediktatoran Arab Saudi*. Dikutip pada tanggal 1 Januari 2014, dari <http://www.merdeka.com/keag/beli-rasa-aman-dengan-uang-kediktatoran-arab>



**Tabel 3.1**

**Perbandingan Syarat Demokrasi Menurut Robert Dahl Dengan Kebijakan  
Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Arab Saudi**

No	Indikasi Demokrasi	Kebijakan Arab Saudi di Masa Arab Spring
1.	Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi	Menjauhkan rakyat dari organisasi atau melarang orang berorganisasi
2.	Kebebasan mengemukakan pendapat	Larangan demonstrasi, karena melanggar prinsip syariah islam Penangkapan para demonstiran dan menghukuminya tanpa melalui jalur hukum
3.	Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara	Sistem monarki yaitu, pemimpin diambil berdasarkan keturunan Penerus dari kerajaan adalah putar-putra atau cucu-cucu dari pendiri kerajaan
4.	Tersedianya sumber informasi alternative	Larangan penggunaan media twitter dan media informasi lainnya Perencanaan menghubungkan akun twitter dengan nomer kartu identitas
5.	Pemilu yang bebas dan jujur	Tidak ada pemilu System monarki yaitu, pemimpin diambil berdasarkan keturunan. Dijelaskan dalam undang-undang pasal 5 bulir b. "hak dinasti di khususkan kepada putra-putra raja"

Sumber: Dikelola dari berbagai sumber

**D. Respon Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Arab Saudi**

Serangan demi serangan dilontarkan oleh pihak kontra pemerintah Riyadh

11.1.1. Para demonstiran juga menghalang kelutan massa dari media internet

untuk menyerukan demonstrasi 11 dan 12 Maret guna meminta perubahan di kerajaan yang sangat konservatif itu.<sup>85</sup>

Aksi protes yang dilakukan oleh rakyat Saudi dianggapi oleh pemerintah Riyadh sebagai tindakan yang "tidak islami". Dewan ulama Riyadh menyatakan bahwa "Dewan menekankan bahwa demonstrasi dilarang di negara ini, dan bahwa cara Islam mewujudkan kepentingan bersama adalah dengan memberikan nasehat."<sup>86</sup>

Pemerintahan Washington sepertinya menutup diri dengan apa yang terjadi di Arab Saudi. Kebijakan Arab Saudi untuk tetap mempertahankan eksistensi keluarga Saud di respon Amerika biasa saja. Bahkan AS tidak sedikitpun membantu para demonstran Saudi yang menginginkan demokrasi. Namun demikian, pemerintah Washington menyatakan hak untuk melancarkan protes harus dihormati di mana pun juga, termasuk di Arab Saudi. Menurut pemerintahan Washington bahwa setiap orang berhak menyatakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Philip Crowley mengatakan, "Amerika Serikat mendukung sejumlah hak universal, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan menyampaikan pendapat".<sup>87</sup> Karena hak untuk berpendapat adalah hak bagi semua masyarakat. Dan setiap idea atau pendapat yang dilontarkan harus di hormati, termasuk juga di Arab Saudi.

---

<sup>85</sup> AS Tekankan Hak Untuk Lancarkan Protes di Arab Saudi. dikutip pada tanggal 30 desember 2012. Diambil dari <http://www.kompas.com> link: '246227' adalah hak untuk lancarkan protes di

Sikap Arab Saudi mengenai protes "sesungguhnya tidak baru" tambahnya. "Kami telah berkomunikasi mengenai sikap kami kepada pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari dialog reguler yang berlangsung dan telah berjalan beberapa waktu," ujar Philip.<sup>88</sup>

Namun pernyataan yang diungkapkan oleh pemerintah Amerika tidak disertai dengan dukungan nyata kepada rakyat Saudi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan dukungan yang diberikan kepada pihak oposisi di negara-negara Timur Tengah lainnya.

Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Washington dalam menyikapi kebijakan yang ditetapkan pemerintah Riyadh, disikapi dengan *soft diplomacy* melalui komunikasi dan dialog antar kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah Amerika tidak mau "gegabah" mengambil langkah dengan tindak kekerasan atau *hard diplomacy* seperti yang terjadi dilakukan terhadap pemerintahan non demokrasi lainnya.

Meskipun demikian hubungan keduanya agak terusik kembali. Dan Arab Saudi pun mengancam untuk menjahui Amerika. Keseriusan Arab Saudi ini ditunjukkan dengan menolaknya Arab Saudi sebagai dewan keamanan PBB. Aksi protes ini dilakukan Arab Saudi terhadap kebijakan yang disebutnya sebagai "standar ganda" terkait kegagalan PBB mengambil tindakan terhadap perang saudara di Suriah dimana Presiden Bashar Al Assad mendapat dukungan kuat dari para pemimpin Syiah di Iran.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid hlm 1.

<sup>89</sup> Menlu AS Bahas Krisis Suriah dan Nuklir Iran di Arab Saudi, dikutip pada tanggal 29 Desember 2012. Dari: <http://www.usindonesia.com/content/menlu-as-bahas-isy-krisis-suriah-dan-nuklir>

Pemerintahan Amerika pun langsung menyikapi hal ini dengan mengirimkan menteri luar negerinya Jhon Kerry untuk memperbaiki hubungan keduanya.<sup>90</sup> Ancaman yang dilancarkan pemerintah Riyadh membuat pemerintahan AS sedikit banyaknya khawatir. Karena jika hubungan keduanya memburuk akan memberikan dampak yang merugikan bagi keduanya. Begitupula tindakan pemerintah Obama untuk “bersegera” memperbaiki hubungan antar keduanya menunjukkan bahwa hubungan keduanya harus terjaga dan berkelanjutan hingga tidak ada batasan waktu.

Pada initinya, ada tiga landasan utama politik luar negeri Arab Saudi untuk bersahabat dengan AS yang hingga kini masih terpelihara, yakni:<sup>91</sup>

- a. Pertama, keduanya anti komunis dan anti gerakan-gerakan radikal-revolusioner;
- b. Kedua, keduanya menginginkan stabilitas dan keamanan di kawasan Teluk
- c. Ketiga, keduanya menginginkan kontinuitas mengalirnya minyak dari Teluk ke negara-negara industri agar tetap menguntungkan baik pihak penjual maupun pembelinya.

---

<sup>90</sup> Menlu AS Tiba di Suriah untuk Perbaiki Hubungan. dikutip pada tanggal 29 Desember 2013, <http://www.widiasia.com/content/amerika-tiba-di-suriyah-untuk-perbaiki>